



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

**KEBIJAKAN PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien dan terpadu serta mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana, guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017, perlu disusun kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1570);
16. Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN 2017. ✓

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Magelang.
6. Kebijakan Pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah.
7. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya.

BAB II

TUJUAN KEBIJAKAN PENGAWASAN

Pasal 2

Tujuan Kebijakan Pengawasan Tahun 2017 :

- a. meningkatkan kualitas pengawasan internal di Lingkungan Pemerintah Daerah; ✓
- b. mensinergikan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Kota Magelang;
- c. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan; dan ✓
- d. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

Pasal 3

Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan uraian kegiatan yang menjadi arahan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

Inspektorat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap :

- a. pengawasan umum dan teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. peningkatan kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Uraian Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (3) Wakil Walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Wakil Walikota memerintahkan kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan penyelesaian hal tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian Negara/Daerah tidak terselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender. ✓
- (2) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan tidak terkait indikasi kerugian keuangan Negara/Daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Wakil Walikota memberikan penilaian terhadap Kepala Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- (3) Dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 15 Februari 2017

WALIKOTA MAGELANG,


SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 15 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,


SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2017 NOMOR 13

PETABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	
	A

NASKAH DINAS (SPD)	
Inspektori Kota Magelang	
JABATAN	
Inspektur	
Sekretaris	
Irbanwil	
Ka. Subag	
Staf Administrasi	

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN 2017

URAIAN KEGIATAN KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN 2017

I. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 terdapat penekanan arah kebijakan pengawasan yang meliputi :

1. menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui pengawasan umum dan pengawasan teknis;
2. peningkatan kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
3. pengawasan dalam rangka pengaduan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik; dan
4. pengawasan terpadu antar APIP.

II. RUANG LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA MAGELANG.

Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- A. Pengawasan Umum terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meliputi :
1. Pembagian Urusan Pemerintahan :
 - ~ Penyerahan Personil, Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Keuangan Daerah :
 - a. kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - b. kebijakan manajemen kas daerah;
 - c. kebijakan pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial;
 - d. kebijakan penerapan pengadaan barang dan jasa; dan
 - e. kepatuhan pemerintah daerah terhadap tindak lanjut evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pelaksanaannya.
 3. Perencanaan Pembangunan daerah :
 - a. konsistensi kebijakan perencanaan dan penganggaran;
 - b. pengendalian tata ruang; dan
 - c. evaluasi capaian target pembangunan daerah.
 4. Pelayanan Publik :
 - a. pelayanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan; dan
 - b. pelayanan perijinan.
 5. Kebijakan Daerah :
 - a. prosedur penyusunan produk hukum;
 - b. inovasi daerah;
 - c. tindak lanjut Peraturan Daerah yang telah dibatalkan oleh Pemerintah; dan
 - d. penyelesaian produk hukum sebagai tindak lanjut peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 6. Kepegawaian :
 - a. Penerapan sistem seleksi terbuka untuk jabatan tertentu;
 - b. Penempatan pimpinan Perangkat Daerah sesuai kompetensi;
 - c. Pembinaan jabatan fungsional Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD), Polisi pamong Praja, Pemadam kebakaran dan Pelatihan Masyarakat.
- B. Pengawasan Teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meliputi :
1. Urusan pemerintahan bidang pendidikan, dengan prioritas :
 - a. program Indonesia Pintar;
 - b. kurikulum 2013; dan
 - c. peningkatan mutu guru.

2. Urusan pemerintahan bidang kesehatan, dengan prioritas :
 - a. gerakan masyarakat sehat; dan
 - b. jaminan kesenahan nasional.
3. Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dengan prioritas :
 - a. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha;
 - b. penyelenggaraan jalan kota; dan
 - c. penyelenggaraan penataan ruang;
4. Urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dengan prioritas penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
5. Urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dengan prioritas :
 - a. penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. penanggulangan bencana;
 - c. pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, penanganan bahan berbahaya dan beracun, dan kebakaran;
 - d. inspeksi peralatan proteksi kebakaran.
6. Urusan pemerintahan bidang sosial, dengan prioritas :
 - a. penertiban pengumpulan sumbangan dan undian;
 - b. penanganan warga negara mogran korban kekerasan;
 - c. penanganan korban Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA); dan
 - d. fungsi panti sosial, anak terlantas, dan fakir miskin.
7. Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, dengan prioritas :
 - a. penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja;
 - b. pelatihan tenaga kerja;
 - c. pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta; dan
 - d. pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga kerja Asing (RPTKA) perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) dan lokasi kerja.

8. Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan prioritas pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan ditingkat daerah;
9. Urusan pemerintahan bidang pangan, dengan prioritas penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah;
10. Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, dengan prioritas pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
11. Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan prioritas :
 - a. penyusunan profile kependudukan; dan
 - b. pengelolaan kartu Identitas Anak (KIA).
12. Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, dengan prioritas penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan keanggotaan dalam wilayah Kota Magelang;
13. Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga, dengan prioritas :
 - a. pemberdayaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader; dan
 - b. pembinaan terhadap kepramukaan.
14. Urusan pemerintahan bidang kebudayaan, dengan prioritas :
 - a. pelestarian dan diplomasi kebudayaan; dan
 - b. memacu gerakan standarisasi bahasa Indonesia sebagai bahasa pendidikan dan ilmu pengetahuan.
15. Urusan pemerintahan bidang pariwisata, dengan prioritas pembangunan destinasi unggulan pariwisata;
16. Urusan pemerintahan bidang perdagangan, dengan prioritas :
 - a. menjaga ketersediaan bahan pokok dan kestabilan harga di daerah;
 - b. penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan; dan
 - c. penerbitan tanda daftar gudang dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB).

C. Pengawasan Walikota terhadap Perangkat Daerah, meliputi :

1. Pengawasan Keuangan dan Kinerja, terdiri dari :
 - a. Aspek keuangan, meliputi :
 - 1) pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - 2) pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
 - 3) pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
 - 4) pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial; dan
 - 5) pengelolaan manajemen kas di bendahara.
 - b. Aspek pengelolaan barang milik daerah/sarana dan prasarana, meliputi :
 - 1) pengelolaan persediaan;
 - 2) pengamanan/sertifikasi aset daerah; dan
 - 3) pengelolaan aset sebagai dampak pengalihan P3D.
 - c. Aspek pengelolaan Sumber Daya Manusia, meliputi :
 - 1) peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
 - 2) penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;
 - 3) pembinaan jabatab fungsional tertentu; dan
 - 4) pembinaan karir Aparatur Sipil Negara.
 - d. Aspek tugas pokok dan fungsi, meliputi :
 - 1) pelaksanaan regulasi sebagai tindak lanjut pelaksana Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2) pelaksanaan program strategis dan prioritas pembangunan daerah;
 - 3) evaluasi target capaian kinerja instansi; dan
 - 4) kepatuhan entitas terhadap hasil reviu dokumen perencanaan dan penganggaran.
2. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat, dengan prioritas :
 - a. dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - b. penyalahgunaan wewenang;
 - c. hambatan dalam pelayanan masyarakat; dan
 - d. pelanggaran disiplin pegawai.
3. Kegiatan Reviu, dengan prioritas :

- a. Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah (RKPD dan renja PD, Reviu RKA dan RKA Perubahan);
 - b. Reviu Laporan Keuangan Daerah; dan
 - c. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP)
4. Kegiatan Evaluasi, dengan prioritas :
- a. Evaluasi penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
 - b. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - c. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
 - d. Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) PD
 - e. Monitoring pelaksanaan program strategis Kepala Daerah.
5. Kegiatan Pengawasan lainnya, meliputi :
- a. pendampingan dan asistensi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual;
 - b. fasilitasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
 - c. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang pengawasan; dan
 - d. koordinasi program pengawasan.
6. Pengawasan terpadu dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	
	4

NASKAH DINAS (SPU)	
Inspektorat Kota Magelang	
JABATAN	Paraf
Inspektur	
Sekretaris	
Irbanwil	
Ka. Subag	
Staf Administrasi	

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
 NOMOR 13 TAHUN 2017
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
RINGKASAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

1 NOMOR URUT	2 URAIAN	3 JUMLAH
1	PENDAPATAN	
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	882.759.301.000,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	217.823.794.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	30.096.800.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.780.203.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.458.617.000,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	175.488.174.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	582.806.750.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	29.517.443.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	440.041.244.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	113.248.063.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	82.128.757.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	16.768.200.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	47.110.557.000,00
2	BELANDA	18.250.000.000,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	969.216.881.000,00
2.1.1	Belanja Pegawai	326.136.404.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	310.620.578.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	9.181.194.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	3.556.255.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	560.703.000,00
2.2	BELANDA LANGSUNG	2.217.674.000,00
2.2.1	Belanja Pegawai	643.080.477.000,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	59.263.231.000,00
2.2.2		360.557.384.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1		3
2.2.3	Belanja Modal	223.259.862.000,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	(86.457.580.000,00)
3.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	107.520.354.000,00
3.1.1	Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah	103.642.354.000,00
3.1.7	Penerimaan Hasil Penarikan	150.000.000,00
3.1.8	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.728.000.000,00
3.2	Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	21.062.774.000,00
3.2.2		21.062.774.000,00
PEMBIAYAAN NETTO		86.457.580.000,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN		0,00

MAGELANG, 20 Desember 2017

WALIKOTA MAGELANG,



SIGITT WIDYONINIBITO



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.2.3	Belanja Modal	223.259.862.000,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH	SURPLUS / (DEFISIT)
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	107.520.354.000,00
3.1.7	Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah	103.642.354.000,00
3.1.8	Penerimaan Hasil Penarikan	150.000.000,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.728.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	21.062.774.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	86.457.580.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

MAGELANG, 20 Desember 2017

WADUKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.2.3	Belanja Modal	223.259.862.000,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	107.520.354.000,00
3.1.1.7	Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah	150.000.000,00
3.1.1.8	Penerimaan Hasil Penarikan	3.728.000.000,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	
3.2.2	Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	21.062.774.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	86.457.580.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

MAGELANG, 20 Desember 2017

WALIKOTA MAGELANG,


SIGIT WIDYONIKMIDTO



PERMINTAH KOTA MAGELANG
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
 TAHUN ANGGARAN 2018

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		JUMLAH BELANJA
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	
1	2	3	4	5	6
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
1.01	Pendidikan	168.509.739.000,00	197.646.392.000,00	433.538.659.000,00	631.185.051.000,00
1.01.1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	136.015.488.000,00	50.205.536.000,00	186.221.024.000,00
1.01.4.01.03	Sekretariat Daerah	0,00	136.015.488.000,00	49.543.631.000,00	185.559.119.000,00
1.01.4.01.05	Kecamatan Magelang Selatan	0,00	0,00	412.781.000,00	412.781.000,00
1.01.4.01.06	Kecamatan Magelang Tengah	0,00	0,00	86.255.000,00	86.255.000,00
1.01.4.01.07	Kecamatan Magelang Utara	0,00	0,00	84.094.000,00	84.094.000,00
1.02	Kesehatan	167.038.539.000,00	45.778.856.000,00	270.722.156.000,00	316.501.012.000,00
1.02.1.02.01	Dinas Kesehatan	7.038.539.000,00	21.110.365.000,00	35.365.745.000,00	56.476.110.000,00
1.02.1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang	160.000.000.000,00	24.668.491.000,00	234.223.903.000,00	258.892.394.000,00
1.02.2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	214.446.000,00	214.446.000,00
1.02.4.01.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	26.104.000,00	26.104.000,00
1.02.4.01.05	Kecamatan Magelang Selatan	0,00	0,00	286.687.000,00	286.687.000,00
1.02.4.01.06	Kecamatan Magelang Tengah	0,00	0,00	357.637.000,00	357.637.000,00
1.02.4.01.07	Kecamatan Magelang Utara	0,00	0,00	247.634.000,00	247.634.000,00
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.160.100.000,00	3.982.141.000,00	81.991.404.000,00	85.973.545.000,00
1.03.1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.160.100.000,00	3.982.141.000,00	62.217.074.000,00	66.199.215.000,00
1.03.1.04.01	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	16.268.400.000,00	16.268.400.000,00
1.03.4.01.05	Kecamatan Magelang Selatan	0,00	0,00	1.187.948.000,00	1.187.948.000,00
1.03.4.01.06	Kecamatan Magelang Tengah	0,00	0,00	766.227.000,00	766.227.000,00
1.03.4.01.07	Kecamatan Magelang Utara	0,00	0,00	1.551.755.000,00	1.551.755.000,00
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	303.600.000,00	2.556.766.000,00	15.280.813.000,00	17.837.579.000,00
1.04.1.04.01	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	303.600.000,00	2.556.766.000,00	13.151.422.000,00	15.708.188.000,00
1.04.1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	1.045.467.000,00	1.045.467.000,00
1.04.2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	1.077.674.000,00	1.077.674.000,00
1.04.4.01.06	Kecamatan Magelang Tengah	0,00	0,00	6.250.000,00	6.250.000,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		JUMLAH BELANJA
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	
1	2	3	4	5	6
4.02 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	613.206.000,00	613.206.000,00
4.02 . 4.02.01	Inspektorat	0,00	3.058.538.000,00	2.133.635.000,00	5.192.173.000,00
4.03	Perencanaan	0,00	3.099.826.000,00	7.073.771.000,00	10.173.597.000,00
4.03 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	1.257.175.000,00	1.257.175.000,00
4.03 . 4.01.04	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	40.436.000,00	40.436.000,00
4.03 . 4.01.05	Kecamatan Magelang Selatan	0,00	0,00	172.199.000,00	172.199.000,00
4.03 . 4.01.06	Kecamatan Magelang Tengah	0,00	0,00	159.466.000,00	159.466.000,00
4.03 . 4.01.07	Kecamatan Magelang Utara	0,00	0,00	181.779.000,00	181.779.000,00
4.03 . 4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	3.099.826.000,00	5.262.716.000,00	8.362.542.000,00
4.04	Keuangan	710.646.996.000,00	22.922.243.000,00	17.352.363.000,00	40.274.606.000,00
4.04 . 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	16.070.000,00	16.070.000,00
4.04 . 2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	109.715.000,00	109.715.000,00
4.04 . 4.01.05	Kecamatan Magelang Selatan	0,00	0,00	76.079.000,00	76.079.000,00
4.04 . 4.01.06	Kecamatan Magelang Tengah	0,00	0,00	94.909.000,00	94.909.000,00
4.04 . 4.01.07	Kecamatan Magelang Utara	0,00	0,00	99.103.000,00	99.103.000,00
4.04 . 4.04.01	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	710.646.996.000,00	22.922.243.000,00	16.956.487.000,00	39.878.730.000,00
4.05	Kepegawaian	0,00	8.418.028.000,00	4.106.887.000,00	12.524.915.000,00
4.05 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	325.206.000,00	325.206.000,00
4.05 . 4.05.01	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	0,00	8.418.028.000,00	3.781.681.000,00	12.199.709.000,00
4.06	Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	1.697.713.000,00	1.697.713.000,00
4.06 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	145.871.000,00	145.871.000,00
4.06 . 4.05.01	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	1.551.842.000,00	1.551.842.000,00
4.07	Penelitian dan Pengembangan	0,00	2.035.594.000,00	2.139.609.000,00	4.175.203.000,00
4.07 . 4.07.01	Badan Penelitian dan Pengembangan	0,00	2.035.594.000,00	2.139.609.000,00	4.175.203.000,00
JUMLAH		882.759.301.000,00	326.136.404.000,00	643.080.477.000,00	969.216.881.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(86.457.580.000,00)			
KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PEMBIAYAAN			SILPA TAB
		PENERIMAAN	PENGELUARAN	PEMBIAYAAN NETTO	
1	2	3	4	5	6
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	107.520.354.000,00	21.062.774.000,00	86.457.580.000,00	
4.04	Keuangan	107.520.354.000,00	21.062.774.000,00	86.457.580.000,00	
4.04 . 4.04.01	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	107.520.354.000,00	21.062.774.000,00	86.457.580.000,00	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANDA		JUMLAH BELANDA
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	
1	2	3	4	5	6
2.18 . 4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	12.264.000,00	12.264.000,00
2.18 . 4.04.01	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	124.850.000,00	124.850.000,00
2.18 . 4.05.01	Badan Kepegawalan, Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	26.102.000,00	26.102.000,00
2.18 . 4.07.01	Badan Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
3	Urusan Pilihan	1.956.968.000,00	13.730.117.000,00	28.195.359.000,00	41.925.476.000,00
3.01	Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	828.589.000,00	828.589.000,00
3.01 . 3.03.01	Dinas Perikanan dan Pangan	0,00	0,00	828.589.000,00	828.589.000,00
3.02	Parwisata	0,00	0,00	3.630.240.000,00	3.630.240.000,00
3.02 . 2.13.01	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Parwisata	0,00	0,00	3.630.240.000,00	3.630.240.000,00
3.03	Pertanian	169.325.000,00	4.630.075.000,00	4.618.437.000,00	9.248.512.000,00
3.03 . 3.03.01	Dinas Pertanian dan Pangan	169.325.000,00	4.630.075.000,00	4.618.437.000,00	9.248.512.000,00
3.05	Energi dan Sumberdaya Mineral	0,00	0,00	7.165.245.000,00	7.165.245.000,00
3.05 . 2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	7.165.245.000,00	7.165.245.000,00
3.06	Perdagangan	0,00	0,00	8.088.443.000,00	8.088.443.000,00
3.06 . 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	8.088.443.000,00	8.088.443.000,00
3.06 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	1.787.643.000,00	9.100.042.000,00	3.680.171.000,00	12.780.213.000,00
3.07	Perindustrian	0,00	0,00	24.329.000,00	24.329.000,00
3.07 . 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	24.329.000,00	24.329.000,00
3.07 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	8.064.114.000,00	8.064.114.000,00
3.08	Transmigrasi	0,00	0,00	184.234.000,00	184.234.000,00
3.08 . 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	184.234.000,00	184.234.000,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	710.972.930.000,00	85.148.424.000,00	85.614.254.000,00	170.762.678.000,00
4.01	Administrasi Pemerintahan	325.934.000,00	45.614.195.000,00	50.497.070.000,00	96.111.265.000,00
4.01 . 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	0,00	0,00	83.313.000,00	83.313.000,00
4.01 . 2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	614.575.000,00	614.575.000,00
4.01 . 2.13.01	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Parwisata	0,00	0,00	135.153.000,00	135.153.000,00
4.01 . 4.01.01	DPD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00	10.797.873.000,00	0,00	10.797.873.000,00
4.01 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	0,00	784.386.000,00	0,00	784.386.000,00
4.01 . 4.01.04	Sekretariat DPRD	0,00	13.426.076.000,00	16.341.744.000,00	29.767.820.000,00
4.01 . 4.01.05	Kecamatan Magelang Selatan	0,00	2.431.563.000,00	26.414.666.000,00	28.846.229.000,00
4.01 . 4.01.06	Kecamatan Magelang Tengah	99.650.000,00	6.235.118.000,00	2.476.334.000,00	8.711.452.000,00
4.01 . 4.01.07	Kecamatan Magelang Utara	147.284.000,00	6.341.277.000,00	2.326.300.000,00	8.667.577.000,00
4.02	Pengawasan	79.000.000,00	5.597.902.000,00	2.104.985.000,00	7.702.887.000,00
		0,00	3.058.538.000,00	2.746.841.000,00	5.805.379.000,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		JUMLAH BELANJA
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	
1	2	3	4	5	6
2.13	Keperudaan dan Olah Raga	0,00	2.738.639.000,00	13.412.920.000,00	16.151.559.000,00
2.13 . 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	6.137.764.000,00	6.137.764.000,00
2.13 . 2.13.01	Dinas Keperudaan, Olah Raga, dan Pariwisata	0,00	2.738.639.000,00	6.531.084.000,00	9.269.723.000,00
2.13 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	185.000.000,00	185.000.000,00
2.13 . 4.01.05	Kecamatan Magelang Selatan	0,00	0,00	222.101.000,00	222.101.000,00
2.13 . 4.01.06	Kecamatan Magelang Tengah	0,00	0,00	163.689.000,00	163.689.000,00
2.13 . 4.01.07	Kecamatan Magelang Utara	0,00	0,00	173.282.000,00	173.282.000,00
2.14	Statistik	0,00	0,00	477.807.000,00	477.807.000,00
2.14 . 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	0,00	0,00	377.347.000,00	377.347.000,00
2.14 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	94.132.000,00	94.132.000,00
2.14 . 4.01.05	Kecamatan Magelang Selatan	0,00	0,00	6.328.000,00	6.328.000,00
2.15	Persandian	0,00	0,00	155.136.000,00	155.136.000,00
2.15 . 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	0,00	0,00	155.136.000,00	155.136.000,00
2.16	Kebudayaan	0,00	0,00	2.865.251.000,00	2.865.251.000,00
2.16 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	2.289.867.000,00	2.289.867.000,00
2.16 . 4.01.05	Kecamatan Magelang Selatan	0,00	0,00	123.296.000,00	123.296.000,00
2.16 . 4.01.06	Kecamatan Magelang Tengah	0,00	0,00	350.283.000,00	350.283.000,00
2.16 . 4.01.07	Kecamatan Magelang Utara	0,00	0,00	101.805.000,00	101.805.000,00
2.17	Perpustakaan	75.000.000,00	0,00	2.819.425.000,00	5.552.646.000,00
2.17 . 2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	75.000.000,00	2.733.221.000,00	2.572.641.000,00	5.305.862.000,00
2.17 . 4.01.05	Kecamatan Magelang Selatan	0,00	0,00	123.447.000,00	123.447.000,00
2.17 . 4.01.06	Kecamatan Magelang Tengah	0,00	0,00	82.270.000,00	82.270.000,00
2.17 . 4.01.07	Kecamatan Magelang Utara	0,00	0,00	41.067.000,00	41.067.000,00
2.18	Kearsipan	0,00	0,00	1.654.727.000,00	1.654.727.000,00
2.18 . 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	43.740.000,00	43.740.000,00
2.18 . 1.04.01	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00
2.18 . 1.05.02	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	10.375.000,00	10.375.000,00
2.18 . 2.12.01	Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	12.536.000,00	12.536.000,00
2.18 . 2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	856.486.000,00	856.486.000,00
2.18 . 3.03.01	Dinas Pertanian dan Pangan	0,00	0,00	34.611.000,00	34.611.000,00
2.18 . 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	23.384.000,00	23.384.000,00
2.18 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	154.462.000,00	154.462.000,00
2.18 . 4.01.04	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	51.582.000,00	51.582.000,00
2.18 . 4.01.05	Kecamatan Magelang Selatan	0,00	0,00	93.388.000,00	93.388.000,00
2.18 . 4.01.06	Kecamatan Magelang Tengah	0,00	0,00	137.588.000,00	137.588.000,00
2.18 . 4.01.07	Kecamatan Magelang Utara	0,00	0,00	54.459.000,00	54.459.000,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		JUMLAH BELANJA
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	
1	2	3	4	5	6
2.06 . 4.01.05	Kecamatan Magelang Selatan	0,00	0,00	321.592.000,00	321.592.000,00
2.06 . 4.01.06	Kecamatan Magelang Tengah	0,00	0,00	234.436.000,00	234.436.000,00
2.06 . 4.01.07	Kecamatan Magelang Utara	0,00	0,00	134.243.000,00	134.243.000,00
2.07	Penberdayaan Masyarakat Desa	16.500.000,00	3.013.126.000,00	3.508.207.000,00	6.521.333.000,00
2.07 . 2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	16.500.000,00	3.013.126.000,00	2.881.541.000,00	5.894.667.000,00
2.07 . 4.01.05	Kecamatan Magelang Selatan	0,00	0,00	232.745.000,00	232.745.000,00
2.07 . 4.01.06	Kecamatan Magelang Tengah	0,00	0,00	142.184.000,00	142.184.000,00
2.07 . 4.01.07	Kecamatan Magelang Utara	0,00	0,00	251.737.000,00	251.737.000,00
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	1.055.840.000,00	1.055.840.000,00
2.08 . 2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	1.014.300.000,00	1.014.300.000,00
2.08 . 4.01.05	Kecamatan Magelang Selatan	0,00	0,00	9.652.000,00	9.652.000,00
2.08 . 4.01.07	Kecamatan Magelang Utara	0,00	0,00	31.888.000,00	31.888.000,00
2.09	Perhubungan	1.036.164.000,00	3.024.772.000,00	7.476.872.000,00	10.501.644.000,00
2.09 . 2.09.01	Dinas Perhubungan	1.036.164.000,00	3.024.772.000,00	7.476.872.000,00	10.501.644.000,00
2.10	Komunikasi dan Informatika	30.000.000,00	2.827.736.000,00	11.581.334.000,00	14.409.070.000,00
2.10 . 1.02.01	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	11.254.000,00	11.254.000,00
2.10 . 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	7.544.000,00	7.544.000,00
2.10 . 1.04.01	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	7.346.000,00	7.346.000,00
2.10 . 1.05.02	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	14.200.000,00	14.200.000,00
2.10 . 2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	32.900.000,00	32.900.000,00
2.10 . 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	30.000.000,00	2.827.736.000,00	8.235.140.000,00	11.062.876.000,00
2.10 . 2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	12.071.000,00	12.071.000,00
2.10 . 3.03.01	Dinas Pertanian dan Pangan	0,00	0,00	9.400.000,00	9.400.000,00
2.10 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	2.919.951.000,00	2.919.951.000,00
2.10 . 4.01.04	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	284.356.000,00	284.356.000,00
2.10 . 4.01.05	Kecamatan Magelang Selatan	0,00	0,00	12.410.000,00	12.410.000,00
2.10 . 4.01.06	Kecamatan Magelang Tengah	0,00	0,00	17.262.000,00	17.262.000,00
2.10 . 4.02.01	Inspektorat	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.10 . 4.05.01	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	1.068.517.000,00	1.068.517.000,00
2.11 . 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	919.147.000,00	919.147.000,00
2.11 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	106.178.000,00	106.178.000,00
2.11 . 4.01.05	Kecamatan Magelang Selatan	0,00	0,00	43.192.000,00	43.192.000,00
2.12	Penanaman Modal	0,00	2.431.019.000,00	1.709.993.000,00	4.141.012.000,00
2.12 . 2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	2.431.019.000,00	1.709.993.000,00	4.141.012.000,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		JUMLAH BELANJA
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	
1	2	3	4	5	6
1.05	Ketertarikan dan Keterlibatan Umum serta Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Dinas Sosial Sekretariat Daerah Kecamatan Magelang Selatan Kecamatan Magelang Tengah Kecamatan Magelang Utara Sosial Dinas Sosial Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sekretariat Daerah Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sekretariat Daerah Kecamatan Magelang Selatan Kecamatan Magelang Tengah Kecamatan Magelang Utara Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Pertanian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pertanian dan Pangan Sekretariat Daerah Kecamatan Magelang Selatan Kecamatan Magelang Tengah Kecamatan Magelang Utara Administrasi Kependudukan dan Cakil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.500.000,00	7.229.184.000,00	12.331.694.000,00	19.560.878.000,00
1.05 . 1.05.01		7.500.000,00	4.718.030.000,00	5.614.966.000,00	10.332.996.000,00
1.05 . 1.05.02		0,00	2.511.154.000,00	2.210.268.000,00	4.721.422.000,00
1.05 . 1.06.01		0,00	0,00	21.602.000,00	21.602.000,00
1.05 . 4.01.03		0,00	0,00	1.422.124.000,00	1.422.124.000,00
1.05 . 4.01.05		0,00	0,00	1.091.085.000,00	1.091.085.000,00
1.05 . 4.01.06		0,00	0,00	1.025.634.000,00	1.025.634.000,00
1.05 . 4.01.07		0,00	0,00	946.015.000,00	946.015.000,00
1.06		0,00	2.083.957.000,00	3.007.056.000,00	5.091.013.000,00
1.06 . 1.06.01		0,00	2.083.957.000,00	2.553.999.000,00	4.637.956.000,00
1.06 . 2.07.01		0,00	0,00	88.683.000,00	88.683.000,00
1.06 . 4.01.03		0,00	0,00	364.374.000,00	364.374.000,00
2		1.319.664.000,00	29.611.471.000,00	95.732.205.000,00	125.343.676.000,00
2.01		0,00	2.454.455.000,00	4.268.437.000,00	6.722.892.000,00
2.01 . 2.01.01		0,00	2.454.455.000,00	4.268.437.000,00	6.722.892.000,00
2.02	0,00	0,00	1.311.571.000,00	1.311.571.000,00	
2.02 . 2.07.01	0,00	0,00	828.508.000,00	828.508.000,00	
2.02 . 4.01.03	0,00	0,00	90.272.000,00	90.272.000,00	
2.02 . 4.01.05	0,00	0,00	77.505.000,00	77.505.000,00	
2.02 . 4.01.06	0,00	0,00	186.110.000,00	186.110.000,00	
2.02 . 4.01.07	0,00	0,00	129.176.000,00	129.176.000,00	
2.03	0,00	0,00	437.672.000,00	437.672.000,00	
2.03 . 3.03.01	0,00	0,00	437.672.000,00	437.672.000,00	
2.04	0,00	0,00	5.830.551.000,00	5.830.551.000,00	
2.04 . 1.04.01	0,00	0,00	5.830.551.000,00	5.830.551.000,00	
2.05	162.000.000,00	7.907.811.000,00	32.487.283.000,00	40.395.094.000,00	
2.05 . 2.05.01	162.000.000,00	7.907.811.000,00	28.877.867.000,00	36.785.678.000,00	
2.05 . 3.03.01	0,00	0,00	1.478.052.000,00	1.478.052.000,00	
2.05 . 4.01.03	0,00	0,00	366.634.000,00	366.634.000,00	
2.05 . 4.01.05	0,00	0,00	512.288.000,00	512.288.000,00	
2.05 . 4.01.06	0,00	0,00	678.654.000,00	678.654.000,00	
2.05 . 4.01.07	0,00	0,00	573.788.000,00	573.788.000,00	
2.06	0,00	2.480.692.000,00	3.610.662.000,00	6.091.354.000,00	
2.06 . 2.06.01	0,00	2.480.692.000,00	2.920.391.000,00	5.401.083.000,00	




MAGELANG, 20 Desember 2017

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

PELABAT PERAK	
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka BUD	

PELABAT PIRAF	
1. SEKDA	
2. KA BADA	
3. SEKRETARIS	
4. KA BID	
5. KA SUB BUD / KA SUB BID	

SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN

0,00

MAGELANG, 20 Desember 2017

MALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN

0,00

MAGELANG, 20 Desember 2017

MALIKOTA MAGELANG,


SIGIT WIDYONINDITO



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.01
 Organisasi : 1.01.01
 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1 KODE REKENING	2 URAIAN	3 JUMLAH	4 DASAR HUKUM
1.01.1.01.01.00.00.5	BELANJA	187.848.986.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	136.015.488.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	136.015.488.000,00	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2	BELANJA LANGSUNG	51.833.498.000,00	
1.01.1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.254.066.000,00	
1.01.1.01.01.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	504.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	504.000,00	
1.01.1.01.01.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	224.980.000,00	
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	224.980.000,00	
1.01.1.01.01.01.06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	24.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	849.181.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.07.4.07.01.19.03.5.2.1	Belanja Pegawai	16.200.000,00	
4.07.4.07.01.19.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.505.000,00	
4.07.4.07.01.19.04	Fasilitasi kepesertaan dalam Anugrah Iprek dan Inovasi	49.461.000,00	
4.07.4.07.01.19.04.5.2.1	Belanja Pegawai	13.440.000,00	
4.07.4.07.01.19.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.021.000,00	
4.07.4.07.01.19.05	Pengerbangan dan Penerapan Produk Teknologi dan Inovasi	222.841.000,00	
4.07.4.07.01.19.05.5.2.1	Belanja Pegawai	45.900.000,00	
4.07.4.07.01.19.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	176.941.000,00	

SURPLUS / (DEFISIT)

(4.187.203.000,00)




MAGELANG, 20 December 2017

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT PARAF

1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	

PEJABAT

1. SEKDA	
2. KA. BANGUN	
3. SENEN ZAMBI	
4. KA. BID	
5. KA. SUB BAG / KA. SUB BID	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.07 . 4.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.200.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.505.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 04	<i>Fasilitasi kepesertaan dalam Anugrah Iptek dan Inovasi</i>	49.461.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.440.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.021.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 05	<i>Pengembangan dan Penerapan Produk Teknologi dan Inovasi</i>	222.841.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.900.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	176.941.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.187.203.000,00)	

MAGELANG, 20 December 2017
 WAKIL KOTA MAGELANG,

 SIGIT WIDYONINDITO

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.07.4.07.01.19.03.5.2.1	Belanja Pegawai	16.200.000,00	
4.07.4.07.01.19.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.505.000,00	
4.07.4.07.01.19.04	<i>Fasilitasi Kepesertaan dalam Anugrah Iptek dan Inovasi</i>	49.461.000,00	
4.07.4.07.01.19.04.5.2.1	Belanja Pegawai	13.440.000,00	
4.07.4.07.01.19.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.021.000,00	
4.07.4.07.01.19.05	<i>Pengembangan dan Penerapan Produk Teknologi dan Inovasi</i>	222.841.000,00	
4.07.4.07.01.19.05.5.2.1	Belanja Pegawai	45.900.000,00	
4.07.4.07.01.19.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	176.941.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.187.203.000,00)	

MAGELANG, 20 December 2017

WALIKOTA MAGELANG,


SIGITT WIDYANINDITO



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5
		PEGAWAI 3	BARANG & JASA 4	MODAL 5	
1	1				
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	25.472.397.000,00	225.920.111.000,00	182.146.151.000,00	433.538.659.000,00
1.01	Pendidikan	4.392.571.000,00	39.553.033.000,00	6.259.932.000,00	50.205.536.000,00
1.01.1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.328.846.000,00	38.954.853.000,00	6.259.932.000,00	49.543.631.000,00
1.01.1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	823.800.000,00	1.430.266.000,00	0,00	2.254.066.000,00
1.01.1.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	504.000,00	0,00	504.000,00
1.01.1.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	224.980.000,00	0,00	224.980.000,00
1.01.1.01.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan pertinahan kendaraan dinas/operasional	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
1.01.1.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	821.400.000,00	27.781.000,00	0,00	849.181.000,00
1.01.1.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	179.484.000,00	0,00	179.484.000,00
1.01.1.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
1.01.1.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	68.450.000,00	0,00	68.450.000,00
1.01.1.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	9.622.000,00	0,00	9.622.000,00
1.01.1.01.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	0,00	5.970.000,00	0,00	5.970.000,00
1.01.1.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	17.168.000,00	0,00	17.168.000,00
1.01.1.01.01.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	0,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
1.01.1.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	129.480.000,00	0,00	129.480.000,00
1.01.1.01.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	344.120.000,00	0,00	344.120.000,00
1.01.1.01.01.01.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	0,00	297.912.000,00	0,00	297.912.000,00
1.01.1.01.01.01.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	2.400.000,00	18.875.000,00	0,00	21.275.000,00
1.01.1.01.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.500.000,00	651.464.000,00	161.085.000,00	814.049.000,00
1.01.1.01.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	450.000,00	17.600.000,00	0,00	18.050.000,00
1.01.1.01.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	146.950.000,00	146.950.000,00
1.01.1.01.01.02.10	Pengadaan meubelur	0,00	0,00	14.135.000,00	14.135.000,00
1.01.1.01.01.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1.050.000,00	50.000.000,00	0,00	51.050.000,00
1.01.1.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	521.349.000,00	0,00	521.349.000,00
1.01.1.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	43.700.000,00	0,00	43.700.000,00
1.01.1.01.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	18.815.000,00	0,00	18.815.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			Jumlah
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
4.07.4.07.01.19.04	Fasilitasi Kepesertaan dalam Anugrah Iptek dan Inovasi Pengembangan dan Penerapan Produk Teknologi dan Inovasi	13.440.000,00	36.021.000,00	0,00	49.461.000,00
4.07.4.07.01.19.05		45.900.000,00	176.941.000,00	0,00	222.841.000,00
Jumlah		59.263.231.000,00	360.557.384.000,00	223.259.862.000,00	643.080.477.000,00




MAGELANG, 20 Desember 2017

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINGDITO

PELABAT PARAF

1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	

PELABAT PARAF

1. SEKDA	
2. KA DANDU	
3. SEKRETARIS	
4. KA BID	
5. KA SUB BID / KA SUB BID	

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA				Jumlah
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	6 = 3 + 4 + 5	
1	2	3	4	5		
4.07 . 4.07.01 . 19 . 04	Fasilitasi kepesertaan dalam Anugrah Iptek dan Inovasi	13.440.000,00	36.021.000,00	0,00	49.461.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 05	Pengembangan dan Penerapan Produk Teknologi dan Inovasi	45.900.000,00	176.941.000,00	0,00	222.841.000,00	
	Jumlah	59.263.231.000,00	360.557.384.000,00	223.259.862.000,00	643.080.477.000,00	

MAGELANG, 20 Desember 2017

WALIKOTA MAGELANG,


SIGIT WIDYOMINDITO

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA				Jumlah
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	6 = 3 + 4 + 5	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	
4.07.4.07.01.19.04	Fasilitasi kepesertaan dalam Anugrah Iptek dan Inovasi Pengenbangan dan Penerapan Produk Teknologi dan Inovasi	13.440.000,00	36.021.000,00	0,00	49.461.000,00	
4.07.4.07.01.19.05		45.900.000,00	176.941.000,00	0,00	222.841.000,00	
Jumlah		59.263.231.000,00	360.557.384.000,00	223.259.662.000,00	643.080.477.000,00	

MAGELANG, 20 Desember 2017

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO



LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
 NOMOR 13 TAHUN 2017
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018



REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
 TAHUN ANGGARAN 2018

KODE	URAIAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG			BELANJA LANGSUNG			JUMLAH
		PEGAWAI	NON PEGAWAI	PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7	
01	PELAYANAN UMUM	72.460.334.000,00	15.515.826.000,00	24.002.341.000,00	67.124.129.000,00	8.794.460.000,00	187.897.090.000,00	
01	Pangan	0,00	0,00	50.900.000,00	386.772.000,00	0,00	437.672.000,00	
01	Komunikasi dan Informatika	2.827.736.000,00	0,00	2.198.810.000,00	7.159.486.000,00	2.223.038.000,00	14.409.070.000,00	
01	Statistik	0,00	0,00	281.414.000,00	150.643.000,00	45.750.000,00	477.807.000,00	
01	Persandian	0,00	0,00	43.400.000,00	111.736.000,00	0,00	155.136.000,00	
01	Kearifan	0,00	0,00	739.812.000,00	869.165.000,00	45.750.000,00	1.654.727.000,00	
01	Administrasi Pemerintahan	45.614.195.000,00	0,00	6.646.540.000,00	38.274.948.000,00	5.575.582.000,00	96.111.265.000,00	
01	Pengawasan	3.058.538.000,00	0,00	1.643.875.000,00	1.102.966.000,00	0,00	5.805.379.000,00	
01	Perencanaan	3.099.826.000,00	0,00	2.241.230.000,00	4.832.541.000,00	0,00	10.173.597.000,00	
01	Keuangan	7.406.417.000,00	15.515.826.000,00	8.320.173.000,00	8.127.850.000,00	904.340.000,00	40.274.606.000,00	
01	Kepegawaian	8.418.028.000,00	0,00	1.377.362.000,00	2.729.525.000,00	0,00	12.524.915.000,00	
01	Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	36.350.000,00	1.661.363.000,00	0,00	1.697.713.000,00	
01	Penelitian dan Pengembangan	2.035.594.000,00	0,00	422.475.000,00	1.717.134.000,00	0,00	4.175.203.000,00	
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	7.229.184.000,00	0,00	3.410.043.000,00	8.921.651.000,00	0,00	19.560.878.000,00	
03	Ketertarikan dan Keterlibatan Umum serta Pertindungan Masyarakat	7.229.184.000,00	0,00	3.410.043.000,00	8.921.651.000,00	0,00	19.560.878.000,00	
04	EKONOMI	24.653.489.000,00	0,00	4.872.722.000,00	31.702.571.000,00	6.021.852.000,00	67.250.634.000,00	
04	Tenaga Kerja	2.454.455.000,00	0,00	446.316.000,00	3.579.493.000,00	242.628.000,00	6.722.892.000,00	
04	Pembertayaan Masyarakat Desa	3.013.126.000,00	0,00	355.525.000,00	3.128.082.000,00	24.600.000,00	6.521.333.000,00	
04	Perhubungan	3.024.772.000,00	0,00	1.016.983.000,00	3.418.138.000,00	3.041.751.000,00	10.501.644.000,00	
04	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	181.650.000,00	886.867.000,00	0,00	1.068.517.000,00	
04	Penanaman Modal	2.431.019.000,00	0,00	268.516.000,00	1.388.527.000,00	52.950.000,00	4.141.012.000,00	
04	Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	34.800.000,00	528.789.000,00	265.000.000,00	828.589.000,00	
04	Pertanian	4.630.075.000,00	0,00	416.364.000,00	3.972.814.000,00	229.259.000,00	9.248.512.000,00	
04	Energi dan Sumberdaya Mineral	0,00	0,00	53.142.000,00	6.503.661.000,00	608.442.000,00	7.165.245.000,00	
04	Perdagangan	0,00	0,00	1.386.808.000,00	5.206.213.000,00	1.495.422.000,00	8.088.443.000,00	
04	Perindustrian	9.100.042.000,00	0,00	691.268.000,00	2.927.103.000,00	61.800.000,00	12.780.213.000,00	

KODE	URAIAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG			BELANJA LANGSUNG			Jumlah
		PEGAWAI	NON PEGAWAI	PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7	
04	3 08 Transmigrasi	0,00	0,00	21.350.000,00	162.884.000,00	0,00	184.234.000,00	
05	LINGKUNGAN HIDUP	7.907.811.000,00	0,00	2.592.068.000,00	16.797.490.000,00	18.928.276.000,00	46.225.645.000,00	
05	2 04 Petanahan	0,00	0,00	8.400.000,00	44.010.000,00	5.778.141.000,00	5.830.551.000,00	
05	2 05 Lingkungan Hidup	7.907.811.000,00	0,00	2.583.668.000,00	16.753.480.000,00	13.150.135.000,00	40.395.094.000,00	
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	6.538.907.000,00	0,00	2.562.940.000,00	17.787.013.000,00	76.922.264.000,00	103.811.124.000,00	
06	1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.982.141.000,00	0,00	1.390.624.000,00	8.377.991.000,00	72.222.789.000,00	85.973.545.000,00	
06	1 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2.556.766.000,00	0,00	1.172.316.000,00	9.409.022.000,00	4.699.475.000,00	17.837.579.000,00	
07	KESEHATAN	45.778.856.000,00	0,00	14.435.021.000,00	158.328.171.000,00	99.014.804.000,00	317.556.852.000,00	
07	1 02 Kesehatan	45.778.856.000,00	0,00	14.400.771.000,00	157.391.581.000,00	98.929.804.000,00	316.501.012.000,00	
07	2 08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	34.250.000,00	936.590.000,00	85.000.000,00	1.055.840.000,00	
08	PARIWISATA DAN BUDAYA	0,00	0,00	293.082.000,00	4.638.659.000,00	1.563.750.000,00	6.495.491.000,00	
08	2 16 Kebudayaan	0,00	0,00	150.575.000,00	2.670.926.000,00	43.750.000,00	2.865.251.000,00	
08	3 02 Pariwisata	0,00	0,00	142.507.000,00	1.967.733.000,00	1.520.000.000,00	3.630.240.000,00	
10	PENDIDIKAN	141.487.348.000,00	0,00	5.372.638.000,00	49.286.357.000,00	11.778.886.000,00	207.925.229.000,00	
10	1 01 Pendidikan	136.015.488.000,00	0,00	4.392.571.000,00	39.553.033.000,00	6.259.932.000,00	186.221.024.000,00	
10	2 13 Keperumudaan dan Olah Raga	2.738.639.000,00	0,00	554.845.000,00	7.459.195.000,00	5.398.880.000,00	16.151.559.000,00	
10	2 17 Perpustakaan	2.733.221.000,00	0,00	425.222.000,00	2.274.129.000,00	120.074.000,00	5.552.646.000,00	
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	4.564.649.000,00	0,00	1.722.376.000,00	5.971.343.000,00	235.570.000,00	12.493.938.000,00	
11	1 06 Sosial	2.083.957.000,00	0,00	706.072.000,00	2.266.833.000,00	34.151.000,00	5.091.013.000,00	
11	2 02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	179.730.000,00	1.131.841.000,00	0,00	1.311.571.000,00	
11	2 06 Administrasi Kependudukan dan Sipil	2.480.692.000,00	0,00	836.574.000,00	2.572.669.000,00	201.419.000,00	6.091.354.000,00	
		310.620.578.000,00	15.515.826.000,00	59.263.231.000,00	360.557.384.000,00	223.259.862.000,00	969.216.881.000,00	



MAGELANG, 20 December 2017
WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

KODE	URAIAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG				BELANJA LANGSUNG			Jumlah
		PEGAWAI	NON PEGAWAI	PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7		
04	Transmigrasi	0,00	0,00	21.350.000,00	162.884.000,00	0,00	184.234.000,00		
05	LINGKUNGAN HIDUP	7.907.811.000,00	0,00	2.592.068.000,00	16.797.490.000,00	18.928.276.000,00	46.225.645.000,00		
05	Pertanahan	0,00	0,00	8.400.000,00	44.010.000,00	5.778.141.000,00	5.830.551.000,00		
05	Lingkungan Hidup	7.907.811.000,00	0,00	2.583.668.000,00	16.753.480.000,00	13.150.135.000,00	40.395.094.000,00		
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	6.538.907.000,00	0,00	2.562.940.000,00	17.787.013.000,00	76.922.264.000,00	103.811.124.000,00		
06	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.982.141.000,00	0,00	1.390.624.000,00	8.377.991.000,00	72.222.789.000,00	85.973.545.000,00		
06	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2.556.766.000,00	0,00	1.172.316.000,00	9.409.022.000,00	4.699.475.000,00	17.837.579.000,00		
07	KESEHATAN	45.778.856.000,00	0,00	14.435.021.000,00	158.328.171.000,00	99.014.804.000,00	317.556.852.000,00		
07	Kesehatan	45.778.856.000,00	0,00	14.400.771.000,00	157.391.581.000,00	98.929.804.000,00	316.501.012.000,00		
07	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	34.250.000,00	936.590.000,00	85.000.000,00	1.055.840.000,00		
08	PARIWISATA DAN BUDAYA	0,00	0,00	293.082.000,00	4.638.659.000,00	1.563.750.000,00	6.495.491.000,00		
08	Kebudayaan	0,00	0,00	150.575.000,00	2.670.926.000,00	43.750.000,00	2.865.251.000,00		
08	Pariwisata	0,00	0,00	142.507.000,00	1.967.733.000,00	1.520.000.000,00	3.630.240.000,00		
10	PENDIDIKAN	141.487.348.000,00	0,00	5.372.638.000,00	49.286.357.000,00	11.778.886.000,00	207.925.229.000,00		
10	Pendidikan	136.015.488.000,00	0,00	4.392.571.000,00	39.553.033.000,00	6.259.932.000,00	186.221.024.000,00		
10	Keperguruan dan Olah Raga	2.738.639.000,00	0,00	554.845.000,00	7.459.195.000,00	5.398.880.000,00	16.151.559.000,00		
10	Perpustakaan	2.733.221.000,00	0,00	425.222.000,00	2.274.129.000,00	120.074.000,00	5.552.646.000,00		
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	4.564.649.000,00	0,00	1.722.376.000,00	5.971.343.000,00	235.570.000,00	12.493.938.000,00		
11	Sosial	2.083.957.000,00	0,00	706.072.000,00	2.266.833.000,00	34.151.000,00	5.091.013.000,00		
11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	179.730.000,00	1.131.841.000,00	0,00	1.311.571.000,00		
11	Administrasi Kependudukan dan Capil	2.480.692.000,00	0,00	836.574.000,00	2.572.669.000,00	201.419.000,00	6.091.354.000,00		
		310.620.578.000,00	15.515.826.000,00	59.263.231.000,00	360.557.384.000,00	223.259.862.000,00	969.216.881.000,00		

MAGELANG, 20 December 2017

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

GOLONGAN / RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e								
Golongan IV/d		1				2		3
Golongan IV/c		24	1			11		36
Golongan IV/b		3	36			38		77
Golongan IV/a			57	8		568	7	640
JUMLAH GOLONGAN IV	0	28	94	8	0	619	7	756
Golongan III/d			11	236	0	215	19	481
Golongan III/c				115	0	167	67	349
Golongan III/b				19	0	156	276	451
Golongan III/a				1	0	210	78	289
JUMLAH GOLONGAN III	0	0	11	371	0	748	440	1570
Golongan II/d						93	70	163
Golongan II/c						20	303	323
Golongan II/b						23	56	79
Golongan II/a						13	116	129
JUMLAH GOLONGAN II	0	0	0	0	0	149	545	694
Golongan I/d							13	13
Golongan I/c							74	74
Golongan I/b							18	18
Golongan I/a								0
JUMLAH GOLONGAN I	0	0	0	0	0	0	105	105
TOTAL	0	28	105	379	0	1516	1097	3125

Magelang, 20 Desember 2017

WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

PEMABAT PABAP
4. SEKDA
3. ASISTEN
1. Ko. Bng

PEMABAT PABAP
1. SEKDA
2. KA BAKAM
3. SEKRETARIS
4. KA BID
5. KA. Sub 5A5/7
KA. Sub 510

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

GOLONGAN / RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e								
Golongan IV/d		1				2		3
Golongan IV/c		24	1			11		36
Golongan IV/b		3	36			38		77
Golongan IV/a			57	8		568	7	640
JUMLAH GOLONGAN IV	0	28	94	8	0	619	7	756
Golongan III/d			11			215	19	481
Golongan III/c				115	0	167	67	349
Golongan III/b				19	0	156	276	451
Golongan III/a				1		210	78	289
JUMLAH GOLONGAN III	0	0	11	371	0	748	440	1570
Golongan II/d						93	70	163
Golongan II/c						20	303	323
Golongan II/b						23	56	79
Golongan II/a						13	116	129
JUMLAH GOLONGAN II	0	0	0	0	0	149	545	694
Golongan I/d							13	13
Golongan I/c							74	74
Golongan I/b							18	18
Golongan I/a								0
JUMLAH GOLONGAN I	0	0	0	0	0	0	105	105
TOTAL	0	28	105	379	0	1516	1097	3125

Magelang, 20 Desember 2017

WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINGRATNO

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

GOLONGAN / RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA Fungsional	STAF	
Golongan IV/e								
Golongan IV/d		1				2		3
Golongan IV/c		24	1			11		36
Golongan IV/b		3	36			38		77
Golongan IV/a			57	8		568	7	640
JUMLAH GOLONGAN IV	0	28	94	8	0	619	7	756
Golongan III/d			11	236	0	215	19	481
Golongan III/c				115	0	167	67	349
Golongan III/b				19	0	156	276	451
Golongan III/a				1		210	78	289
JUMLAH GOLONGAN III	0	0	11	371	0	748	440	1570
Golongan II/d						93	70	163
Golongan II/c						20	303	323
Golongan II/b						23	56	79
Golongan II/a						13	116	129
JUMLAH GOLONGAN II	0	0	0	0	0	149	545	694
Golongan I/d							13	13
Golongan I/c							74	74
Golongan I/b							18	18
Golongan I/a								0
JUMLAH GOLONGAN I	0	0	0	0	0	0	105	105
TOTAL	0	28	105	379	0	1516	1097	3125

Magelang, 20 Desember 2017

Wakil Walikota Magelang

SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN VII
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

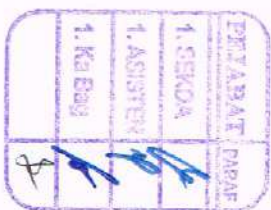
No	Uraian rincian piutang	Tahun pengakuan piutang	Jumlah piutang sampai dengan tahun 2016	Perkiraan penambahan tahun 2017	Perkiraan pengurangan tahun 2017	Perkiraan saldo akhir tahun 2017
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6
	PIUTANG PAJAK DAERAH		13.003.098.737,00	0,00	938.719.626,00	12.064.379.111,00
1	Piutang Pajak Penerangan Jalan	2016	637.559.426,00	0,00	637.559.426,00	0,00
2	Piutang Pajak Reklame	2016	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3	Piutang Pajak Air Tanah	2016	1.846.000,00	0,00	1.134.400,00	711.600,00
4	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	2016	12.363.673.311,00	0,00	300.005.800,00	12.063.667.511,00
	PIUTANG RETRIBUSI DAERAH		894.116.296,00	0,00	0,00	894.116.296,00
1	Piutang Retribusi Pasar	2003	264.988.630,00	0,00	0,00	264.988.630,00
2	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Kios Pasar)	2015	10.737.216,00	0,00	0,00	10.737.216,00
3	Piutang Retribusi IMB	2009	609.113.000,00	0,00	0,00	609.113.000,00
4	Piutang Retribusi Pemaknaan Tanah	2014	9.277.450,00	0,00	0,00	9.277.450,00
	PIUTANG LAIN-LAIN PADA YANG SAH		32.920.455.232,57	0,00	123.458.904,11	22.796.996.328,46
1	Piutang Lain-Lain PAID yang Sah (Dinas Perhubungan, Kominfo)	2002	130.127.025,00	0,00	0,00	130.127.025,00
2	Piutang Lain-Lain PAID yang Sah (RSUD Tidak Relowmanagan)	2014	21.942.436.391,00	0,00	0,00	21.942.436.391,00
3	Piutang Lain-Lain PAID yang Sah (Pasar Penampungan Relowmanagan)	2010	565.708.000,00		0,00	565.708.000,00
4	Piutang Lain-Lain PAID yang Sah (Kepada Pihak Ketiga)	2011	45.499.419,46		0,00	45.499.419,46
5	Piutang BLICD Puskesmas (Klaim BPJS)	2015	14.010.000,00		0,00	14.010.000,00

6	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya (Pasar Cacaban)	2015	606.880,00	0,00	0,00	606.880,00
7	Piutang Bunga Deposito	2016	123.458.904,11	0,00	123.458.904,11	0,00
8	Piutang BPJS UPT Farmasi	2016	98.608.613,00	0,00	0,00	98.608.613,00
	PIUTANG TRANSFER		3.484.393.472,00	0,00	3.484.393.472,00	0,00
1	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	2016	3.484.393.472,00	0,00	3.484.393.472,00	0,00
	PIUTANG LAINNYA		3.924.745.859,00	0,00	2.000.000,00	3.922.745.859,00
1	Piutang Lain-Lain (Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipsahkan)	2002	19.175.386,00	0,00	0,00	19.175.386,00
2	Piutang Lain-Lain (Pengembalian Kescjahteraan)	2004	2.248.369.600,00	0,00	2.000.000,00	2.246.369.600,00
3	Piutang Lain-Lain (Dana Bergulir PK/ Koperasi)	2003 s/d 2011	100.791.500,00	0,00	0,00	100.791.500,00
4	Piutang Lain-Lain (Modal Penyertaan Koperasi)	2007 s/d 2013	158.000.000,00	0,00	0,00	158.000.000,00
5	Piutang Lain-Lain (Dana Bergulir Kelompok)	2012 s/d 2014	1.274.000.000,00	0,00	0,00	1.274.000.000,00
6	Piutang Lain-Lain (LPT - INDAG)	2005 s/d 2012	124.409.373,00	0,00	0,00	124.409.373,00
	Jumlah		44.226.809.596,57	0,00	4.548.572.002,11	39.678.237.594,46

Magelang, 20 Desember 2017

MADIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO



6	Piutang Lain-Lain PAID yang Sah Lainnya (Pasar Cacaban)	2015	606.880,00	0,00	0,00	606.880,00
7	Piutang Bunga Deposito	2016	123.458.904,11	0,00	123.458.904,11	0,00
8	Piutang BPJS UPT Farmasi	2016	98.608.613,00	0,00	0,00	98.608.613,00
	PIUTANG TRANSFER		3.484.393.472,00	0,00	3.484.393.472,00	0,00
1	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	2016	3.484.393.472,00	0,00	3.484.393.472,00	0,00
	PIUTANG LAINNYA		3.924.745.859,00	0,00	2.000.000,00	3.922.745.859,00
1	Piutang Lain-Lain (Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan)	2002	19.175.386,00	0,00	0,00	19.175.386,00
2	Piutang Lain-Lain (Penggembalian Kecelakaan)	2004	2.248.369.600,00	0,00	2.000.000,00	2.246.369.600,00
3	Piutang Lain-Lain (Dana Bergulir PK/ Koperasi)	2003 s/d 2011	100.791.500,00	0,00	0,00	100.791.500,00
4	Piutang Lain-Lain (Modal Penyertaan Koperasi)	2007 s/d 2013	158.000.000,00	0,00	0,00	158.000.000,00
5	Piutang Lain-Lain (Dana Bergulir Kelompok)	2012 s/d 2014	1.274.000.000,00	0,00	0,00	1.274.000.000,00
6	Piutang Lain-Lain (LPT - INDAQ)	2005 s/d 2012	124.409.373,00	0,00	0,00	124.409.373,00
	Jumlah		44.226.809.596,57	0,00	4.548.572.002,11	39.678.237.594,46

Magelang, 20 Desember 2017
 WILUKOTA MAGELANG

 SIGIT WIDYANINDITO

PERMINTAH KOTA MAGELANG
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
No penyertaan modal	Tahun penyertaan modal	Nama Badan / Lembaga / Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan modal (investasi) daerah	Bentuk penyertaan modal (investasi) daerah	Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah	Jumlah modal yang telah disertakan sampai tahun anggaran lalu	Penyertaan modal tahun ini	Pengurangan penyertaan modal tahun ini	Jumlah modal yang telah disertakan dengan tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini	Jumlah sisa modal (investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini
1	1979	PDAM Kota Magelang		Penyertaan Modal	0,00	22.465.342.450,79	6.562.774.000,00	0,00	29.028.116.450,79	0,00	1.529.520.000,00	0,00	29.028.116.450,79
2		Bank Pembangunan Daerah Kota Magelang	Perda No 3 Tahun 2013	Saham	15.900.000.000,00	15.900.000.000,00	8.500.000.000,00	0,00	24.400.000.000,00	0,00	2.178.456.000,00	0,00	24.400.000.000,00
3	1986/1987	Bank Magelang Kota Magelang		Penyertaan Modal	31.544.047.269,28	31.544.047.269,28	3.000.000.000,00	0,00	34.544.047.269,28	0,00	2.040.165.000,00	0,00	34.544.047.269,28
4	1995	PRPP Jawa Tengah		Saham	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
5	1989/2000	PT.Ow/ Terma Kwa Lamgang Kota Magelang		Penyertaan Modal	18.343.809.676,71	18.343.809.676,71	2.500.000.000,00	0,00	20.843.809.676,71	0,00	1.452.192.000,00	0,00	20.843.809.676,71
7	2002	PD Pembangunan Kota Magelang		Penyertaan Modal	1.879.753.981,70	1.879.753.981,70		0,00	1.879.753.981,70	0,00	55.461.000,00	0,00	1.879.753.981,70
8	2002	PD Persewaan Kota Magelang		Penyertaan Modal	3.591.101.410,25	3.591.101.410,25		0,00	3.591.101.410,25	0,00	24.967.000,00	0,00	3.591.101.410,25
9	2007	BBR - BKR Magelang		Penyertaan Modal	5.681.803.916,32	5.681.803.916,32	500.000.000,00	0,00	6.181.803.916,32	0,00	177.856.000,00	0,00	6.181.803.916,32
Jumlah					0,00	99.555.858.705,05	21.062.774.000,00	0,00	120.618.632.705,05	0,00	7.458.617.000,00	0,00	120.618.632.705,05

Magelang, 20 Desember 2017
Wakil Wali Kota Magelang

SIGIT WIDYONO

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
 DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2018

No	Tahun penyertaan modal	Nama Badan / Lembaga / Pihak Ketiga	Daerah Hickum modal (investasi) daerah	Beituk penyertaan modal (investasi) daerah	Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah	Jumlah modal yang telah disetorkan sampai tahun anggaran lalu	Penyertaan modal tahun ini	Pengurangan penyertaan modal tahun ini	Jumlah modal yang telah disetorkan sampai dengan tahun ini	Sisa modal yang belum disetorkan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini	Jumlah sisa modal (investasi) yang disetorkan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1979	PDAM Kota Magelang		Penyertaan Modal	0,00	22.465.342.450,79	6.562.774.000,00	0,00	29.028.116.450,79	0,00	1.529.520.000,00	0,00	29.028.116.450,79
2		Bank Pembangunan Daerah Kota Magelang		Saham		15.900.000.000,00	8.500.000.000,00	0,00	24.400.000.000,00	0,00	2.178.456.000,00	0,00	24.400.000.000,00
3	1986/1987	Bank Magelang Kota Magelang		Penyertaan Modal		31.544.047.269,28	3.000.000.000,00	0,00	34.544.047.269,28	0,00	2.010.165.000,00	0,00	34.544.047.269,28
4	1995	PRPP Jawa Tengah		Saham		150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
5	1999/2000	PDOW Taman Xavi Langgeng Kota Magelang		Penyertaan Modal		18.343.809.676,71	2.500.000.000,00	0,00	20.843.809.676,71	0,00	1.452.192.000,00	0,00	20.843.809.676,71
7	2002	PD Herkangkulan Kota Magelang		Penyertaan Modal		1.879.753.981,70		0,00	1.879.753.981,70	0,00	55.461.000,00	0,00	1.879.753.981,70
8	2002	PD Peretakan Kota Magelang		Penyertaan Modal		3.591.101.410,25		0,00	3.591.101.410,25	0,00	24.967.000,00	0,00	3.591.101.410,25
9	2007	BPR - BKK Magelang		Penyertaan Modal		5.681.803.916,32	500.000.000,00	0,00	6.181.803.916,32	0,00	177.856.000,00	0,00	6.181.803.916,32
Jumlah					0,00	99.555.858.705,05	21.062.774.000,00	0,00	120.618.632.705,05	0,00	7.458.617.000,00	0,00	120.618.632.705,05

Magelang, 20 Desember 2017
 W. KURNIAWAN
 SEKRETARIS DAERAH
 SEKRETARIS DAERAH

PEJABAT PIPAF
 1. SEKDA
 1. ASISTEN
 1. KA BAQ

PEJABAT PIPAF
 1. SEKDA
 2. KA BADAN
 3. SEKRETARIS
 4. KA BID
 5. KA SUB BAG / KA SUB BID

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Tahun penyertaan modal	Nama Badan / Lembaga / Pihak Keciga	Dasar Hukum Penyertaan modal (investasi) daerah	Bentuk penyertaan modal (investasi) daerah	Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah	Jumlah modal yang telah disertakan sampai tahun anggaran lalu	Penyertaan modal tahun ini	Pengurangan penyertaan modal tahun ini	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini	Jumlah sisa modal (investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7+8-9	11=6-10	12	13	14=10+13
1	1979	PDAM Kota Magelang	Perda No.3 Tahun 2013	Penyertaan Modal	0,00	22.465.342.450,79	6.562.774.000,00	0,00	29.028.116.450,79	0,00	1.529.520.000,00	0,00	29.028.116.450,79
2		Bank Pembangunan Daerah Kota Magelang		Saham		15.900.000.000,00	8.500.000.000,00	0,00	24.400.000.000,00	0,00	2.178.456.000,00	0,00	24.400.000.000,00
3	1986/1987	Bank Magelang Kota Magelang		Penyertaan Modal		31.544.047.269,28	3.000.000.000,00	0,00	34.544.047.269,28	0,00	2.040.165.000,00	0,00	34.544.047.269,28
4	1995	PIPPP Jawa Tengah		Saham	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
5	1999/2000	PDOW Taman Kota Langgeng Kota Magelang		Penyertaan Modal	0,00	18.343.809.676,71	2.500.000.000,00	0,00	20.843.809.676,71	0,00	1.452.192.000,00	0,00	20.843.809.676,71
7	2002	PIJ Berbenkelen Kota Magelang		Penyertaan Modal	0,00	1.879.753.981,70	0,00	0,00	1.879.753.981,70	0,00	55.461.000,00	0,00	1.879.753.981,70
8	2002	PIJ Perencanaan Kota Magelang		Penyertaan Modal	0,00	3.591.101.410,25	0,00	0,00	3.591.101.410,25	0,00	24.967.000,00	0,00	3.591.101.410,25
9	2007	HRP - BRK Magelang		Penyertaan Modal	0,00	5.681.803.916,32	500.000.000,00	0,00	6.181.803.916,32	0,00	177.856.000,00	0,00	6.181.803.916,32
Jumlah					0,00	99.555.858.705,05	21.052.774.000,00	0,00	120.618.632.705,05	0,00	7.458.617.000,00	0,00	120.618.632.705,05

Magelang, 20 Desember 2017
WALIKOTA MAGELANG
SICIT WIDYONIRITTO

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Jenis Aset Tetap Daerah	Saldo pada akhir tahun 2016	Perkiraan penambahan tahun 2017	Perkiraan pengurangan tahun 2017	Perkiraan saldo akhir tahun 2017
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Tanah	1.561.853.532.620,40	5.550.650,00	0,00	1.561.859.083.270,40
2	Peralatan dan Mesin	424.799.734.189,27	56.048.214.049,00	0,00	480.847.948.238,27
3	Gedung dan Bangunan	601.388.084.569,48	19.171.818.543,00	0,00	620.559.903.112,48
4	Jalan, Irigasi dan jaringan	784.700.988.086,56	7.798.916.649,00	0,00	792.499.904.735,56
5	Aset Tetap Lainnya	43.811.793.704,31	864.161.895,00	0,00	44.675.955.599,31
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	12.389.754.400,00	11.282.300.140,00	0,00	23.672.054.540,00
7	Akumulasi Penyusutan	(928.936.697.038,22)	-	0,00	(928.936.697.038,22)
Jumlah		2.500.007.190.531,80	95.170.961.926,00	0,00	2.595.178.152.457,80

Magelang, 20 Desember 2017

WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO



LAMPIRAN IX
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
**DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

No	Jenis Aset Tetap Daerah	Saldo pada akhir tahun 2016	Perkiraan penambahan tahun 2017	Perkiraan pengurangan tahun 2017	Perkiraan saldo akhir tahun 2017
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Tanah	1.561.853.532.620,40	5.550.650,00	0,00	1.561.859.083.270,40
2	Peralatan dan Mesin	424.799.734.189,27	56.048.214.049,00	0,00	480.847.948.238,27
3	Gedung dan Bangunan	601.388.084.569,48	19.171.818.543,00	0,00	620.559.903.112,48
4	Jalan, ligasi dan jaringan	784.700.988.086,56	7.798.916.649,00	0,00	792.499.904.735,56
5	Aset Tetap Lainnya	43.811.793.704,31	864.161.895,00	0,00	44.675.955.599,31
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	12.389.754.400,00	11.282.300.140,00	0,00	23.672.054.540,00
7	Akumulasi Penyusutan	(928.936.697.038,22)	-	0,00	(928.936.697.038,22)
Jumlah		2.500.007.190.531,80	95.170.961.926,00	0,00	2.595.178.152.457,80

Magelang, 20 Desember 2017

WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Jenis Aset Tetap Daerah	Saldo pada akhir tahun 2016	Perkiraan penambahan tahun 2017	Perkiraan pengurangan tahun 2017	Perkiraan saldo akhir tahun 2017
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Tanah	1.561.853.532.620,40	5.550.650,00	0,00	1.561.859.083.270,40
2	Peralatan dan Mesin	424.799.734.189,27	56.048.214.049,00	0,00	480.847.948.238,27
3	Gedung dan Bangunan	601.388.084.569,48	19.171.818.543,00	0,00	620.559.903.112,48
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	784.700.988.086,56	7.798.916.649,00	0,00	792.499.904.735,56
5	Aset Tetap Lainnya	43.811.793.704,31	864.161.895,00	0,00	44.675.955.599,31
6	Konstruksi dalam Pegeerjaan	12.389.754.400,00	11.282.300.140,00	0,00	23.672.054.540,00
7	Akumulasi Penyusutan	(928.936.697.038,22)	-	0,00	(928.936.697.038,22)
Jumlah		2.500.007.190.531,80	95.170.961.926,00	0,00	2.595.178.152.457,80

Magelang, 20 Desember 2017
 WALIKOTA MAGELANG

 SIGIT WIDYANINGDITO

LAMPIRAN X
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

KOTA MAGELANG
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN - LAIN
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Jenis Aset Lainnya	Saldo pada akhir tahun 2016	Perkiraan penambahan tahun 2017	Perkiraan pengurangan tahun 2017	Perkiraan saldo akhir tahun 2017
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	12.468.000,000,00	0,00	0,00	12.468.000.000,00
2	Aset Tak Berwujud	10.631.176,588,00	198.811.500,00	0,00	10.829.988.088,00
3	Aset Lain - lain	146.596.567,716,88	0,00	0,00	146.596.567.716,88
4	Amortisasi	(9.447.984,658,53)	0,00	0,00	(9.447.984.658,53)
5	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(40.203.443.820,45)	0,00	0,00	(40.203.443.820,45)
Jumlah		120.044.315.825,90	198.811.500,00	0,00	120.243.127.325,90

Magelang, 20 Desember 2017

WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO




KOTA MAGELANG
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN - LAIN
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Jenis Aset Lainnya	Saldo pada akhir 2016	Perkiraan penambahan tahun 2017	Perkiraan pengurangan tahun 2017	Perkiraan saldo akhir 2017	Perkiraan saldo akhir tahun
1	2	3	4	5	6=3+4-5	
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	12.468.000.000,00	0,00	0,00		12.468.000.000,00
2	Aset Tak Berwujud	10.631.176.588,00	198.811.500,00	0,00		10.829.988.088,00
3	Aset Lain - lain	146.596.567.716,88	0,00	0,00		146.596.567.716,88
4	Amortisasi	(9.447.984.658,53)	0,00	0,00		(9.447.984.658,53)
5	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(40.203.443.820,45)	0,00	0,00		(40.203.443.820,45)
	Jumlah	120.044.315.825,90	198.811.500,00	0,00		120.243.127.325,90

Magelang, 20 Desember 2017

WALIKOTA MAGELANG



SIGIT WIDYANINDITO

KOTA MAGELANG
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN - LAIN
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Jenis Aset Lainnya	Saldo pada akhir 2016	Perkiraan penambahan tahun 2017	Perkiraan pengurangan tahun 2017	Perkiraan saldo akhir 2017
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	12.468.000,000,00	0,00	0,00	12.468.000.000,00
2	Aset Tak Berwujud	10.631.176,588,00	198.811.500,00	0,00	10.829.988.088,00
3	Aset Lain - lain	146.596.567.716,88	0,00	0,00	146.596.567.716,88
4	Amortisasi	(9.447.984.658,53)	0,00	0,00	(9.447.984.658,53)
5	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(40.203.443.820,45)	0,00	0,00	(40.203.443.820,45)
Jumlah		120.044.315.825,90	198.811.500,00	0,00	120.243.127.325,90

Magelang, 20 Desember 2017

WALIKOTA MAGELANG


SIGIT WIDYANINDITO

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Nama SKPD	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun 2017		Jumlah Realisasi s.d akhir TA.2017 (Rp)	Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini (Rp)	
				APBD TA. 2017	Perubahan APBD TA. 2017		APBD TA.2018	Perubahan APBD TA. 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah				-	-	-	-	-



Magelang, 20 Desember 2017

WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN XI
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
 NOMOR 13 TAHUN 2017
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DAFTAR KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Nama SKPD	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun 2017		Jumlah Realisasi s.d akhir TA.2017 (Rp)	Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini (Rp)	
				APBD TA. 2017	Perubahan APBD TA. 2017		APBD TA.2018	Perubahan APBD TA. 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah				-	-	-	-	-

Magelang, 20 Desember 2017
 WALIKOTA MAGELANG


 SIGITT WIDYONINDITO

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Nama SKPD	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun 2017		Jumlah Realisasi s.d akhir TA.2017 (Rp)	Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini (Rp)	
				APBD TA. 2017	Perubahan APBD TA. 2017		APBD TA.2018	Perubahan APBD TA. 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah				-	-	-	-	-

Magelang, 20 Desember 2017
 WAIKOTA MAGELANG


 SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN XIII
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
 NOMOR 13 TAHUN 2017
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
 DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Sumber pinjaman daerah	Dasar hukum pinjaman/obligasi	Tanggal/Tahun Perjanjian Pinjaman/Obligasi	Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (tahun)	Persentase bunga pinjaman %	Tujuan penggunaan pinjaman	Jumlah Pembayaran tahun ini		Jumlah sisa pembayaran (Rp)	
								Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)	Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH											

Magelang, 20 Desember 2017
 W/ALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO



LAMPIRAN XIII
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
**DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

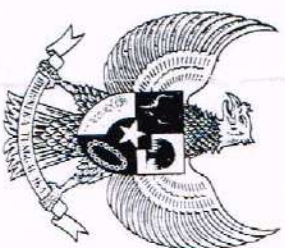
No.	Sumber pinjaman daerah	Dasar hukum pinjaman/obligasi	Tanggal/Tahun Perjanjian Pinjaman/Obligasi	Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (tahun)	Persentase bunga pinjaman %	Tujuan penggunaan pinjaman	Jumlah Pembayaran tahun ini		Jumlah sisa pembayaran (Rp)	
								Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)	Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH											

Magelang, 20 Desember 2017

WAKIL KOTA MAGELANG



SIGIT WIDYONINDITO



LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2017

DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2018

LAMPIRAN XIII
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
**DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

No.	Sumber pinjaman daerah	Dasar hukum pinjaman/obligasi	Tanggal/Tahun Perjanjian Pinjaman/Obligasi	Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (tahun)	Persentase bunga pinjaman %	Tujuan penggunaan pinjaman	Jumlah Pembayaran tahun ini		Jumlah sisa pembayaran (Rp)	
								Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)	Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH											

Magelang, 20 Desember 2017


WALIKOTA MAGELANG


SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN XIII
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
 NOMOR 13 TAHUN 2017
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
 DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Sumber pinjaman daerah	Dasar hukum pinjaman/obligasi	Tanggal/Tahun Perjanjian Pinjaman/Obligasi	Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (tahun)	Persentase bunga pinjaman %	Tujuan penggunaan pinjaman	Jumlah Pembayaran tahun ini		Jumlah sisa pembayaran (Rp)	
								Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)	Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)
1								9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH											

Magelang, 20 Desember 2017
 WAKIL KOTA MAGELANG

 SIGIT WIDYONINDITO

6	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya (Pasar Cacaban)	2015	606.880,00	0,00	0,00	606.880,00
7	Piutang Bunga Deposito	2016	123.458.904,11	0,00	123.458.904,11	0,00
8	Piutang BPJS UPT Farmasi	2016	98.608.613,00	0,00	0,00	98.608.613,00
	PIUTANG TRANSFER		3.484.393.472,00	0,00	3.484.393.472,00	0,00
1	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	2016	3.484.393.472,00	0,00	3.484.393.472,00	0,00
	PIUTANG LAINNYA		3.924.745.859,00	0,00	2.000.000,00	3.922.745.859,00
1	Piutang Lain-Lain (Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan)	2002	19.175.386,00	0,00	0,00	19.175.386,00
2	Piutang Lain-Lain (Pengembalian Kesjahateraan)	2004	2.248.369.600,00	0,00	2.000.000,00	2.246.369.600,00
3	Piutang Lain-Lain (Dana Bergulir PK/ Koperasi)	2003 s/d 2011	100.791.500,00	0,00	0,00	100.791.500,00
4	Piutang Lain-Lain (Modal Perjuryaan Koperasi)	2007 s/d 2013	158.000.000,00	0,00	0,00	158.000.000,00
5	Piutang Lain-Lain (Dana Bergulir Kelompok)	2012 s/d 2014	1.274.000.000,00	0,00	0,00	1.274.000.000,00
6	Piutang Lain-Lain (LPT - INDAQ)	2005 s/d 2012	124.409.373,00	0,00	0,00	124.409.373,00
	Jumlah		44.226.809.596,57	0,00	4.548.572.002,11	39.678.237.594,46

Magelang, 20 Desember 2017
 MALIKOTA MAGELANG

 SIGIT WIDYOKINDITO